

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Edited by Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Apeldorn, L.J. van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan ke. Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2011.
- Arianto, Henry. *Modul 1 Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2013.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hk & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Daerah, Tim penyusun peraturan. “Naskah Akademik Dan Raperda Tentang Penyakit Masyarakat,” 2015.
- Dipoyudo, Kirdi. *Keadilan Sosial*. Seri Pengh. Jakarta: CV. Rajawali, 1985.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Revisi, Ce. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Handoko, Duwi. *Dekriminalisasi Terhadap Delik-Delik Dalam KUHP*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2016.
- Hiariej, Eddy O.S. *PRINSIP-PRINSIP HUKUM PIDANA (EDISI REVISI)*. 01 ed. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Kartono, and Kartini. *Patologi Sosial*. Rajawali, 1988.
- Lamintang, P.A.F. *Hukum Penitensier Indonesia*. Cetakan ke. Bandung: CV. Armico, 1994.
- Lubis, M. Solly. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Alumni, 1982.

- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Cetakan ke. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *MENGENAL HUKUM SUATU PENGANTAR*. 4th ed. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. Edited by Arita L. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Ridlo, Mohammad Agung. *Mengupas Problem Kota Semarang Metropolitan*. Semarang: CV Budi Utama, 2016.
- Rizal, Moch Choirul. *BUKU AJAR HUKUM PIDANA*. Edited by Lembaga Studi Hukum Pidana. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), 2021.
- Soedarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
- Soekanto, Soerjono. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Cetakan pe. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV Rajawali, 1985.
- Sugiyono. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. 19th ed. Bandung: ALFABETA, 2013.
- Sunarto, Kamanto. *Pengantar Sosiologi*. Revisi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
- Suparni, Niniek. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Suratman, and Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: ALFABETA, 2013.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

———. *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)*. 32nd ed. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (n.d.).

UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (n.d.).

UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (2011).

Peraturan Pemerintah RI No 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (1980).

Perppu No. 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945 (n.d.).

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat (2015).

## **C. Putusan**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “PUTUSAN NO 29/PUU-X/2012” Jakarta, 2012.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “PUTUSAN NO 40/PUU-X/2012.” Jakarta, 2012.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “PUTUSAN NO 110/PUU-X/2012.” Jakarta, 2012.

#### D. Jurnal dan Internet

Adiyanta, F.C. Susila. "Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris." *Administrative Law & Governance Journal* 2 (2019).

Afriani, Ikhfa Nur. "Implementasi Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kabupaten Banyumas Perspektif Masalah Mursalah." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020.

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Edited by Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Anindyajati, Titis, Irfan Nur Rachman, and Anak Agung Dian Onita. "Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam Pembentukan Perundang-Undangan." *Jurnal Konstitusi* 12 (2015).

Apeldorn, L.J. van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan ke. Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2011.

Arianta, Ketut, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yulianti. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KAUM ETNIS ROHINGYA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL." *E-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha* 3 (2020).

Arianto, Henry. *Modul 1 Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2013.

Ariyanto, Eko April, and Karolin Rista. "Pentingnya Pendidikan & Meningkatkan Motivasi Belajar Anak." *Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa* 01, no. 02 (2018).

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hk & Kebijakan Penanggulangan*

*Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, 2001.

Arifin, Muhammad Zainul, Muhammad Syahri Ramadhan, Happy Warsito, and Ardian Nugraha. “Perlindungan Hukum Dari Negara Terhadap Masyarakat Fakir Miskin Menurut Konsep Welfare State (Studi Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Di Kota Palembang ).” *Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 5 (2020).

Barus, Zulfadli. “ANALISIS FILOSOFIS TENTANG PETA KONSEPTUAL PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN PENELITIAN HUKUM SOSIOLOGIS.” *Dinamika Hukum* 13 (2013).

Daerah, Tim penyusun peraturan. “Naskah Akademik Dan Raperda Tentang Penyakit Masyarakat,” 2015.

Damayanti, Febriana, Thirwaty Aarsal, and Adang Syamsyudin Sulaha. “Kondisi Sosial Ekonomi Pengemis Dalam Perspektif Teori Dramaturgi (Studi Kasus Di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas).” *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture* 5, no. 2 (2016): 143–54.

Dewan Perwakilan Rakyat. UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (2011).

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas. “Daftar PGOT Dan PSK Yang Di Salurkan Ke Baresos Tahun 2020 Kegiatan Penertiban Dan Pengiriman Hasil Razia PGOT Dan PSK Ke Panti Rehabsos Tahun 2020.” 2020.

Dipoyudo, Kirdi. *Keadilan Sosial*. Seri Pengh. Jakarta: CV. Rajawali, 1985.

DPRD Kabupaten Banyumas. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat (2015).

Fadilah, Umatin, Indri Yunita, and Juli Prasetya. "KONSEPTUALISASI PGOT DALAM KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyakit Masyarakat)." Purwokerto, 2015.

Fitri, Beby Suryani, Riswan Munthe, and Aggreni Atmei Lubis. "Asas Ultimum Remedium/The Last Resort Principle Terhadap Pelaku Usaha Dalam Hukum Perlindungan Konsumen." *Doktrina: Journal of Law* 4 (2021).

Fuadah, Laily, Tri Marhaeni Pudji Astuti, and Cahyo Budi Utomo. "Tindakan Sosial Tunawisma Terhadap Strategi Bertahan Hidup Di Kota Semarang." *Journal of Education Social Studies* 6 (2017): 45.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Revisi, Ce. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Handayani, Ari. "Implementasi Perda Nomor 16 Tahun 2015 Dalam Penyelesaian Masalah Pengemi Di Krumput, Desa Pageralang, Kabupaten Banyumas." Universitas Negeri Yogyakarta, 2018.

Handoko, Duwi. *Dekriminalisasi Terhadap Delik-Delik Dalam KUHP*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2016.

Hiariej, Eddy O.S. *PRINSIP-PRINSIP HUKUM PIDANA (EDISI REVISI)*. 01 ed. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik. "PUTUSAN NO 110/PUU-X/2012." Jakarta, 2012.

Jamilah, Asiyah, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG DARI PRESPEKTIF POLITIK KRIMINAL." *Justitia Jurnal Hukum* 4 (2020).

Jasmina, Dewi. "Jenis PMKS Dan Definisi." Kementerian Sosial Republik Indonesia,

2017.

Kartono, and Kartini. *Patologi Sosial*. Rajawali, 1988.

Lamintang, P.A.F. *Hukum Penitensier Indonesia*. Cetakan ke. Bandung: CV. Armico, 1994.

Lubis, M. Solly. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Alumni, 1982.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Putusan Nomor 29/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” 2012.

Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Cetakan ke. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Maulinda, T. Mulya, and Ubaidulla. “IMPLEMENTASI PASAL 34 AYAT 1 UUD 1945 TENTANG FAKIR MISKIN DAN ANAK-ANAK YANG TERLANTAR DIPELIHARA OLEH NEGARA (Studi Pada Pemerintah Kota Banda Aceh).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 4 (2019).

Mertokusumo, Sudikno. *MENGENAL HUKUM SUATU PENGANTAR*. 4th ed. Yogyakarta: Liberty, 2008.

Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

———. *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)*. 32nd ed. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.

Patty, Jetty Martje, and Luchy Edmon Teterissa. “Pelarangan Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah Agar Menimbulkan Efek Jera.” *Belo V* (2020).

“PERBUATAN PIDANA Dan PERTANGGUNGJAWABAN Dalam HUKUM PIDANA, Pidato Oleh Prof. Moeljanto, S.H.” 1955.

Perppu No. 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945 (n.d.).

Pospos, Ade Fadillah FW. “FENOMENA PENGEMIS DI KOTA LANGSA (KAJIAN TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN SESEORANG MENJADI PENGEMIS).” *JII* 2 (2017): 97.

PP No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (n.d.).

Pratama, A. Poenta. “Efektifitas Sanksi Terhadap Penanggulangan Pengemis Dan Gelandangan Di Kabupaten Banyumas.” Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, 2017.

Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. Edited by Arita L. Jakarta: PT Grasindo, 2010.

Ridlo, Mohammad Agung. *Mengupas Problem Kota Semarang Metropolitan*. Semarang: CV Budi Utama, 2016.

Rizal, Moch Choirul. *BUKU AJAR HUKUM PIDANA*. Edited by Lembaga Studi Hukum Pidana. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), 2021.

Rohmah, Novi Nur. “Model Penanganan Bagi Pengemis, Gelandangan, Dan Orang Terlantar Di Kabupaten Banyumas.” Universitas Negeri Semarang, 2017.

Setiawan, Hendy. “FENOMENA GELANDANGAN PENGEMIS SEBAGAI DAMPAK DISPARITAS PEMBANGUNAN KAWASAN URBAN DAN RURAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.” *MODERAT* 6 (2020): 361.

Shafrudin. “PELAKSANAAN POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENEGAKKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA.” *Jurnal Hukum Pro*

*Justitia* 27 (2009).

Soedarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.

Soekanto, Soerjono. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Cetakan pe. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

———. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV Rajawali, 1985.

Sugiyono. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. 19th ed. Bandung: ALFABETA, 2013.

Sunarto, Kamanto. *Pengantar Sosiologi*. Revisi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.

Suparni, Niniek. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Suratman, and Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: ALFABETA, 2013.

UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (n.d.).

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (n.d.).

Wijaya, I Komang Mahardika, and I Gede Yusa. “Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Penggunaan Jasa Prostitusi Di Indonesia.” *Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana* 8 (2019).

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas. “Daftar PGOT Dan PSK Yang Di Salurkan Ke Baresos Tahun 2020 Kegiatan Penertiban Dan Pengiriman Hasil Razia PGOT Dan PSK Ke Panti Rehabsos Tahun 2020.”

2020.